UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Menangani Penipuan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia: Celah Hukum, Ancaman, dan Urgensi Reformasi
Kesia Jadelin, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ADDRESSING AI-GENERATED FRAUD IN INDONESIA: LEGAL GAPS, EMERGING THREATS, AND THE NEED FOR REFORM

By: Kesia Jadelin[1] and Muhammad Fatahillah Akbar[2]

ABSTRACT

This research analyzes the emergence of AI-generated fraud in Indonesia as a new method of cybercrime, exploiting voice cloning technology to impersonate individuals and deceive victims. Using a normative legal approach combined with case studies and comparative analysis, this study examines how Indonesia's existing legal framework, particularly Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), fails to adequately address the complexity of AI-driven impersonation, and creates difficulty for proper prosecution and law enforcement.

Findings reveal that victims face severe challenges in seeking legal redress due to gaps in statutory definitions, evidentiary hurdles in authenticating AI-generated voices, limited inter-agency coordination, and the absence of effective victim redress mechanisms. A comparative review of the European Union's AI Act and the United States' Federal Trade Commission and state-level regulations highlight best practices in platform accountability, victim protection, and enforcement standards. This research concludes that Indonesia requires urgent legal reform focused on victim-centered remedies, institutional capacity building, and the establishment of a national redress scheme to ensure meaningful protection against AI-generated fraud.

Keywords: AI-generated fraud, victim redress, Indonesia, EU AI Act, Federal Trade Commission, cybercrime.

[1] Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, International Undergraduate Program.
[2] Lecturer of the Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Menangani Penipuan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia: Celah Hukum, Ancaman, dan Urgensi Reformasi
Kesia Jadelin, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

MENANGANI PENIPUAN BERBASIS KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA: CELAH HUKUM, ANCAMAN YANG MUNCUL, DAN URGENSI REFORMASI

Oleh: Kesia Jadelin[1] *dan* Muhammad Fatahillah Akbar[2]

INTISARI

*Penelitian ini menganalisis kemunculan penipuan berbasis kecerdasan buatan (*AI-generated fraud*) di* Indonesia *sebagai metode baru dalam kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi* voice cloning *untuk menyamar sebagai individu lain dan menipu korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan studi kasus dan analisis komparatif, penelitian ini menelaah bagaimana kerangka hukum yang berlaku di* Indonesia*, terutama Undang-Undang Nomor* 1 *Tahun* 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) dan Undang-Undang Nomor* 11 *Tahun* 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*)—belum mampu secara memadai mengatur kompleksitas penyamaran yang digerakkan oleh teknologi* AI, yang menimbulkan kesulitan dalam proses keadilan dan penegakkan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban menghadapi berbagai tantangan serius dalam memperoleh pemulihan hukum akibat adanya kekosongan norma, kendala pembuktian dalam mengautentikasi suara yang dihasilkan AI*, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta ketiadaan mekanisme kompensasi korban yang efektif. Kajian komparatif terhadap* AI Act *Uni Eropa serta regulasi* Federal Trade Commission (FTC) *dan tingkat negara bagian di Amerika Serikat menyoroti praktik terbaik dalam akuntabilitas platform, perlindungan korban, dan standar penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum yang mendesak dengan fokus pada pemulihan yang berpusat pada korban (*victim-centered remedies*), peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan skema kompensasi nasional guna memastikan perlindungan yang efektif terhadap penipuan berbasis kecerdasan buatan (*AI-generated fraud*).*

Kata kunci: *Penipuan panggilan suara berbasis* AI, *kompensasi korban*, Indonesia, AI Act *Uni Eropa*, Federal Trade Commission, *dan kejahatan siber*.

---

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
[2] Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.